

STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGANI DAMPAK RETALIASI CHINA TERHADAP PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT

Mamun¹, Pupung Purnamasari²

mamun.sh12345@gmail.com¹, pupungpurnamasari@pelitabangsa.ac.id²

Universitas Pelita Bangsa

ABSTRAK

Perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China telah memicu berbagai tindakan balasan yang berdampak pada stabilitas ekonomi global. Sebagai negara dengan hubungan dagang signifikan dengan kedua kekuatan besar tersebut, Indonesia menghadapi risiko ekonomi yang cukup besar, terutama terkait ekspor, volatilitas mata uang, dan arus investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi dampak ekonomi dari retaliasi China terhadap perang dagang Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, laporan pemerintah, dan wawancara dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan tiga strategi utama: diversifikasi perdagangan, penguatan industri dalam negeri, dan diplomasi aktif dalam forum multilateral. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi besar dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Perang Dagang, Indonesia, Retaliasi China, Strategi Ekonomi, Diversifikasi, Ketahanan.

ABSTRACT

The escalating trade war between the United States and China has triggered a series of retaliatory measures, impacting global economic stability. As a country with significant trade ties to both superpowers, Indonesia faces considerable economic risks, particularly in terms of exports, currency volatility, and investment flows. This research aims to analyze Indonesia's strategic responses to mitigate the economic impact of China's retaliation against the U.S. trade war. Using a qualitative descriptive method, data were collected through literature reviews, government reports, and expert interviews. The findings reveal that Indonesia has adopted three main strategies: trade diversification, strengthening domestic industries, and diplomatic engagement in multilateral forums. These efforts are intended to reduce dependence on major economic powers and enhance economic resilience.

Keywords: Trade War, Indonesia, China Retaliation, Economic Strategy, Diversification, Resilience.

PENDAHULUAN

Ekonomi dan politik merupakan dua disiplin yang memiliki keterkaitan erat, di mana dinamika politik dapat memengaruhi arah kebijakan ekonomi, dan sebaliknya, kondisi ekonomi dapat menentukan keputusan politik. Dalam kajian ekonomi politik internasional, faktor kekuasaan, sistem nilai, serta derajat otonomi politik suatu negara berperan dalam membentuk struktur dan proses interaksi ekonomi global. Negara memanfaatkan instrumen politik dan ekonominya untuk memengaruhi pasar internasional, baik terhadap negara pesaing maupun mitra strategis. Asumsi dasar dalam ekonomi politik internasional menyatakan bahwa negara, perusahaan multinasional, serta aktor transnasional lainnya memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengubah rezim internasional melalui kekuatan yang dimilikinya. (Syahfitri et al., 2024)

Tujuan negara dalam ekonomi politik internasional tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup pembentukan dan pemeliharaan hubungan ekonomi yang stabil dengan negara lain. Pasar global beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi dan keuntungan maksimum, sementara negara tetap memiliki peran sebagai regulator yang menentukan arah perkembangan ekonomi nasional. (Rompis et al., 2024)

Ketergantungan ekonomi antarnegara menyebabkan setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara berpotensi menimbulkan dampak terhadap negara lain. Ketegangan ekonomi yang terjadi di negara dengan kekuatan ekonomi besar dapat memberikan pengaruh sistemik terhadap stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, negara cenderung mengadopsi kebijakan ekonomi luar negeri yang bersifat strategis, yang dapat berupa kerja sama, integrasi ekonomi, hingga kemungkinan terjadinya konflik atau perang dagang.

Salah satu bentuk keterkaitan ekonomi antarnegara yang paling nyata terlihat melalui aktivitas perdagangan internasional, yang menjadi fondasi utama dalam interaksi ekonomi global. Aktivitas jual beli antar individu, kelompok, atau lembaga dikenal sebagai perdagangan. Dalam praktiknya, perdagangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan lintas negara (internasional). Perdagangan internasional terjadi ketika transaksi ekonomi dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berada di negara berbeda, sehingga proses pertukaran barang atau jasa berlangsung dalam skala global. (Media, 2025)

Menurut Nuri Aslami (2022), perdagangan internasional merupakan interaksi ekonomi antarnegara yang dapat melibatkan sektor swasta maupun pemerintah. Setiap negara hampir pasti melakukan perdagangan internasional, karena adanya perbedaan sumber daya alam, teknologi, dan tenaga kerja yang mendorong kebutuhan saling melengkapi. Selain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan domestik, hubungan dagang antarnegara ini juga memberikan keuntungan timbal balik bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, perdagangan antarnegara dapat dibedakan menjadi dua aktivitas utama, yaitu ekspor dan impor. Ekspor mengacu pada pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah proses pemasukan barang dari luar negeri ke pasar domestik (Suharjon et al., 2018). Kehadiran kegiatan ekspor dan impor membawa berbagai manfaat bagi negara, seperti mendorong pertumbuhan sektor industri, memperkuat daya saing ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan salah satu dinamika penting dalam lanskap ekonomi global kontemporer. Ketegangan ini tidak hanya dipicu oleh ambisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kepentingan politik nasional seperti peningkatan keamanan dan pencapaian visi proteksionis Presiden Donald Trump. Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk-produk dari Tiongkok, termasuk dari wilayah seperti Taiwan, sebagai upaya memperlambat dominasi ekonomi Tiongkok di pasar Amerika.

Kebijakan proteksionis ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Perdagangan Bebas (FTA), yang secara normatif melarang intervensi sepihak terhadap aliran perdagangan. Namun demikian, Amerika Serikat tetap menerapkan pendekatan unilateral tersebut, didorong oleh tuduhan terhadap Tiongkok yang dianggap melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui serangan siber terhadap perusahaan teknologi dan basis data manufaktur Amerika. Sebagai respons atas tuduhan ini, Amerika memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Tiongkok, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan penguatan kebijakan perdagangannya, termasuk penerapan tarif balasan terhadap produk impor dari Amerika Serikat. (Rompis et al., 2024)

Interaksi saling balas antara dua negara ekonomi terbesar dunia ini memunculkan efek domino terhadap stabilitas perekonomian global. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, turut merasakan dampak dari kebijakan tarif dan perang dagang ini, terutama dalam bentuk melemahnya nilai tukar mata uang, penurunan ekspor komoditas, serta meningkatnya volatilitas pasar modal. Perubahan kebijakan perdagangan yang terjadi secara unilateral oleh negara-negara besar menciptakan ketidakpastian global yang berdampak pada negara berkembang. (Kompas, 2025)

Sebagai negara dengan posisi strategis dalam rantai pasok global, Indonesia harus menyesuaikan diri melalui pendekatan kebijakan yang fleksibel dan netral. Salah satu strategi yang digunakan adalah penerapan prinsip non-blok dalam hubungan internasional, di mana Indonesia tidak secara langsung berpihak kepada kekuatan besar manapun, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok. Meskipun demikian, tindakan proteksionis dari kedua negara tetap memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, terutama karena kenaikan tarif yang diterapkan menurunkan daya saing produk nasional di pasar global. (Savira, 2023)

Akibatnya, terjadi penurunan penjualan komoditas ekspor Indonesia, yang selanjutnya berdampak pada sektor produksi dalam negeri. Ketidakseimbangan antara permintaan domestik dan kapasitas produksi turut menyebabkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlemah ketahanan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

Fenomena ini dikenal sebagai perang dagang, yaitu ketika dua negara saling memberlakukan tarif atau kuota impor sebagai bentuk kebijakan saling membalas. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, aktivitas perdagangan internasional akan menurun secara signifikan dan mendorong terjadinya inflasi akibat meningkatnya harga barang impor. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi contoh nyata dari konflik ekonomi yang berkepanjangan dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang konstruktif hingga saat ini.

Ketegangan ekonomi antara kedua negara tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap kondisi domestik masing-masing, tetapi juga mengganggu stabilitas dan integrasi ekonomi global. Mengingat Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, setiap kebijakan yang mereka ambil memiliki pengaruh sistemik terhadap negara lain. Data perdagangan pada tahun 2017 menunjukkan ketimpangan signifikan, di mana ekspor Amerika ke Tiongkok hanya mencapai US\$130 miliar, sementara impor dari Tiongkok mencapai US\$506 miliar (Amadeo, *Trade Wars and their Effects on the Economy and You*, 2019). Ketimpangan ini menjadi dasar bagi Presiden Trump untuk memulai perang dagang pada tahun 2018 sebagai upaya mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.

Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki hubungan dagang dengan kedua negara adidaya tersebut, tidak berada di luar lingkaran dampak konflik ini. Ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor, khususnya dalam komoditas primer seperti kelapa sawit, karet, tekstil, dan produk elektronik, membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak eksternal. Dampak dari retaliasi Tiongkok terhadap kebijakan perdagangan Amerika Serikat menyebabkan terjadinya perubahan pola permintaan global, gangguan rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, hingga penurunan harga ekspor komoditas strategis Indonesia.

Penurunan tarif impor antara Amerika Serikat dan Tiongkok setelah negosiasi selama 90 hari memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tarif impor AS terhadap produk China berkurang dari 145% menjadi 30%, sedangkan tarif impor China terhadap produk AS menurun dari 125% menjadi 10%. Kondisi ini menimbulkan peluang

bagi ekspor bahan baku mentah dan barang setengah jadi dari Indonesia ke pasar global.

Peningkatan permintaan bahan baku mentah dari China dan Amerika Serikat berpotensi memperkuat kinerja ekspor Indonesia, terutama pada komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Nilai tukar rupiah mengalami stabilisasi akibat meredanya ketegangan dagang, sehingga membantu menjaga cadangan devisa dan mengendalikan inflasi. Faktor ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Risiko persaingan pada produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi juga meningkat. Produk China yang menikmati tarif impor lebih rendah berpotensi mengambil pangsa pasar ekspor Indonesia di Amerika Serikat. Kondisi tersebut dapat menekan daya saing industri manufaktur nasional dan berimplikasi pada penurunan produksi serta tenaga kerja. (Mai, 2022)

Posisi Indonesia saat ini lebih dominan sebagai penyedia bahan mentah dan barang setengah jadi dalam rantai pasok global. Keterbatasan pengembangan produk bernilai tambah menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas ekspor Indonesia. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah memerlukan perhatian serius untuk menghindari risiko jangka panjang terhadap pertumbuhan industri nasional.

Strategi diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk manufaktur menjadi langkah yang krusial. Percepatan hilirisasi industri dan transformasi ekonomi ke arah manufaktur bernilai tambah perlu diprioritaskan. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan kebijakan tarif global serta memanfaatkan peluang pasar internasional secara optimal.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, artikel media, dan dokumen resmi terkait penurunan tarif impor antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. (Sugiyono, 2020)

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan informasi yang berhubungan dengan dinamika tarif impor, perdagangan internasional, serta strategi ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menguraikan hubungan sebab-akibat dan implikasi kebijakan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Perdagangan Amerika dan China

Tahun 2018 menandai babak baru dalam hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina melalui konflik perang dagang yang masih berlangsung hingga kini. Konflik ini dimulai pada masa kampanye Presiden Donald Trump, yang menyoroti praktik dagang Cina yang dianggap tidak adil. Pada tahun 2017, ekspor Amerika Serikat ke Cina mencapai US\$130 miliar, sementara impor dari Cina jauh lebih besar, yakni US\$506 miliar. Trump kemudian menegakkan pajak untuk kasus anti dumping, anti subsidi, serta meninjau defisit neraca perdagangan AS.

Pada April 2017, Trump dan Presiden Cina Xi Jinping menyepakati rencana pembicaraan dagang selama 100 hari. AS melakukan investigasi impor baja dan aluminium serta membuka akses bagi produk Cina di sektor agrikultur, energi, dan keuangan. Namun, upaya ini gagal saat Agustus 2017 AS menyelidiki dugaan pencurian kekayaan intelektual

oleh Cina. Sejak awal 2018, ketegangan meningkat dengan pemberlakuan tarif impor oleh kedua negara pada berbagai produk, termasuk mesin cuci, panel surya, baja, dan aluminium. Cina merespons dengan tarif balasan pada produk AS seperti buah-buahan, daging, kedelai, dan pesawat terbang.

Pertengahan 2018 menjadi puncak eskalasi dengan Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 25% pada ratusan produk Cina senilai miliaran dolar, yang dibalas oleh Cina dengan tarif balasan serupa. Pada September 2018, Cina membatalkan negosiasi dan merilis pernyataan resmi yang semakin memperkeruh hubungan. Namun, pada Desember 2018, setelah pertemuan G20, kedua negara sepakat menunda kenaikan tarif selama 90 hari, dengan harapan tercapai kesepakatan terkait isu transfer teknologi, kekayaan intelektual, dan hambatan non tarif.

Meski demikian, negosiasi kerap terhenti dan berujung pada peningkatan tarif baru pada tahun 2019. Amerika Serikat juga melarang perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei, membeli komponen dari AS, menambah ketegangan. Pada pertemuan G20 di Osaka Juni 2019, kedua pemimpin setuju melanjutkan pembicaraan dan menghentikan kenaikan tarif sementara. Namun, ketidakpastian terus berlanjut dengan berbagai putusan tarif tambahan, penghentian pembelian produk pertanian, serta pelemahan mata uang Cina terhadap dolar AS.

Perang dagang ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga tentang persaingan teknologi dan praktik dagang yang dianggap tidak adil oleh AS, termasuk isu transfer teknologi paksa dan manipulasi nilai mata uang oleh Cina. Barang-barang “Made in China” yang murah dan berkualitas menjadi tantangan besar bagi pasar Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Presiden Trump mengusung kampanye “Make America Great Again” dengan harapan perang dagang dapat memperbaiki posisi ekonomi AS dan mengurangi dominasi teknologi Cina di pasar global.

Pada periode 2021 hingga 2024, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, kebijakan tarif terhadap barang-barang impor dari China tetap dipertahankan, dengan nilai sekitar 360 miliar dolar AS. Alih-alih mencabut tarif yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya, Biden bahkan memperketat bea masuk pada sektor-sektor strategis seperti kendaraan listrik, baja, aluminium, dan semikonduktor. Selain itu, Biden memberlakukan kontrol ekspor yang ketat terhadap teknologi tinggi, termasuk chip komputer dan kecerdasan buatan, dengan tujuan membatasi kemajuan teknologi militer China. Langkah-langkah ini juga diikuti dengan penguatan kebijakan industri dalam negeri melalui undang-undang seperti CHIPS Act dan Inflation Reduction Act, serta tindakan spesifik seperti mewajibkan penjualan aplikasi TikTok kepada perusahaan non China. Pendekatan Biden terhadap China bersifat sistematis namun tetap keras.

Memasuki tahun 2025, dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, rencana penerapan tarif impor dari China kembali mencuat dengan tajam. Trump mengumumkan rencana tarif hingga 145 persen untuk semua barang impor asal China. Sebagai respons, China membalas dengan tarif hingga 125 persen pada produk impor dari Amerika Serikat. Setelah pengumuman tersebut, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memulai komunikasi dengan China, dan menuntut agar Presiden Xi Jinping yang mengambil langkah pertama. Pemerintahannya juga menolak keterlibatan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, sebagai perantara karena dianggap tidak cukup dekat dengan lingkaran dalam Presiden Xi, dan mengajukan nama-nama alternatif yang ditolak oleh China. China menolak tekanan ini dengan tegas, menyatakan bahwa menyerah pada tekanan hanya akan mendorong tuntutan yang lebih besar. Di sisi lain, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump masih optimis dengan kemungkinan

tercapainya kesepakatan dagang, asalkan China menunjukkan itikad baik. Namun, jika tidak, Amerika Serikat akan terus mengambil langkah yang dianggap menguntungkan kepentingan rakyatnya dan mendukung praktik perdagangan yang adil secara global.

Dampak Perang Dagang Amerika-China

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan dinamika perdagangan internasional yang kompleks dan cenderung kontraproduktif bagi kedua negara. Kebijakan proteksionis berupa peningkatan tarif impor, yang awalnya ditujukan untuk melindungi industri domestik masing-masing, justru berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi internal. Misalnya, penerapan tarif tinggi terhadap impor aluminium dan baja dari Tiongkok menyebabkan menurunnya volume impor kedua komoditas tersebut di pasar Amerika Serikat. Kelangkaan bahan baku ini menghambat aktivitas produksi sejumlah sektor industri yang sangat bergantung pada pasokan tersebut. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya produksi yang berujung pada naiknya harga jual produk akhir di pasar domestik, yang secara langsung membebani konsumen.

Situasi serupa juga dialami oleh Tiongkok, yang memberlakukan pembatasan impor terhadap berbagai produk asal Amerika Serikat, seperti minuman anggur, kedelai, buah-buahan, kendaraan bermotor, dan pesawat udara. Ketergantungan terhadap beberapa produk dari Amerika Serikat menjadikan pembatasan tersebut sebagai faktor penghambat bagi sektor industri terkait. Akumulasi dari kebijakan pembalasan dagang ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tekanan inflasi, baik di Amerika Serikat maupun di Tiongkok.

Jika dilakukan perbandingan antara kedua negara, Tiongkok menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta ekspansi investasi ke berbagai negara mitra, seperti Hong Kong, Australia, Pakistan, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Rusia, Kanada, dan Indonesia. Meskipun sebagian kebutuhan produksinya masih dipenuhi melalui impor dari Amerika Serikat, dalam hal volume perdagangan, Amerika Serikat cenderung memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap produk-produk asal Tiongkok. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perdagangan AS lebih rentan terhadap gangguan suplai dari Tiongkok dibandingkan sebaliknya.

Konflik dagang antara dua kekuatan ekonomi global ini juga memunculkan dampak eksternal bagi negara-negara lainnya. Dari sisi positif, terdapat peluang bagi negara ketiga untuk mengambil peran sebagai mitra dagang alternatif bagi kedua negara yang bersengketa. Keterbatasan pasokan akibat pembatasan impor mendorong Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mencari sumber alternatif dari negara lain guna memenuhi kebutuhan domestik. Di sisi lain, banjirnya produk Tiongkok ke pasar global, termasuk Indonesia, sebagai akibat dari tertutupnya pasar Amerika Serikat, dapat menciptakan tekanan kompetitif yang serius terhadap industri dalam negeri, khususnya industri baja dan aluminium.

Adapun dampak terhadap konsumen di negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam perang dagang cenderung bersifat netral atau bahkan menguntungkan. Masuknya produk dari kedua negara besar tersebut ke pasar global membuka peluang bagi konsumen untuk memperoleh lebih banyak pilihan produk dengan variasi harga yang lebih kompetitif. Namun demikian, ketegangan dagang global seperti ini tetap perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi internasional secara lebih luas.

Dampak Perang Amerika-China Terhadap Indonesia

Penelitian Ulfa (2023) yang menggunakan pendekatan teori liberalisme, menekankan pentingnya interdependensi, diplomasi ekonomi, dan kebijakan perdagangan internasional dalam hubungan antarnegara. Konsep interdependensi menjelaskan bahwa negara-negara

saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan domestiknya melalui pertukaran sumber daya, baik berupa barang maupun jasa. Indonesia menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok melalui aktivitas ekspor dan impor di pasar internasional, yang juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Sementara itu, konsep kebijakan perdagangan internasional digunakan untuk menganalisis kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok, serta implikasinya secara global.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi titik awal dimulainya konflik perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam kampanyenya, Trump menekankan perlunya menyeimbangkan neraca perdagangan, terutama terhadap Tiongkok, yang dianggap melakukan praktik perdagangan tidak adil, seperti transfer teknologi secara paksa, subsidi industri, dan distorsi pasar investasi. Kebijakan tersebut berdampak luas tidak hanya pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga terhadap mitra dagang mereka, termasuk Indonesia.

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Perubahan dinamika perdagangan global menciptakan ketidakpastian, khususnya terkait dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional, Indonesia perlu melakukan penyesuaian kebijakan melalui diplomasi ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut.

Masuknya Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah mendorong integrasi ekonomi negara tersebut secara global, meningkatkan nilai ekspor dan arus investasi asing. Namun, ketimpangan neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok menjadi isu utama, dengan defisit yang meningkat dari US\$ 371,8 miliar pada tahun 2016 menjadi US\$ 395,8 miliar pada 2017. Sebagai respons, Amerika Serikat menerapkan tarif impor terhadap produk-produk asal Tiongkok, seperti baja dan aluminium, dengan tarif hingga 25%.

Bagi Indonesia, perang dagang ini berdampak pada beberapa sektor strategis. Tiongkok merupakan tujuan ekspor terbesar Indonesia, terutama untuk komoditas mentah seperti bijih besi dan baja, yang merupakan bahan baku utama dalam industri elektronik—salah satu sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif Amerika Serikat. Jika terjadi penurunan permintaan dari Tiongkok, maka ekspor Indonesia pun akan ikut terdampak, termasuk industri tekstil dan produk kelapa sawit.

Berdasarkan data ekspor tahun 2017, Indonesia mengekspor sebesar 13,7% produknya ke Tiongkok dan 10,6% ke Amerika Serikat. Dengan demikian, hampir seperempat dari total ekspor Indonesia tergantung pada dua negara yang tengah terlibat dalam konflik dagang tersebut. Oleh karena itu, gejolak yang terjadi antara kedua negara besar ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Dampak spesifik dari perang dagang ini antara lain adalah penurunan volume ekspor Indonesia, khususnya pada komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, yang mengalami penurunan hingga 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penerapan tarif tinggi terhadap produk biodiesel oleh Amerika Serikat serta penurunan permintaan bahan baku industri di Tiongkok akibat kebijakan restriktif. Selain itu, ekspor logam Indonesia, termasuk aluminium, besi, dan baja, juga terdampak. Pada tahun 2017, Indonesia mencatatkan keuntungan sebesar US\$ 19 juta dari ekspor baja dan US\$ 70 juta dari ekspor aluminium ke Amerika Serikat, angka yang berpotensi menurun akibat

pengenaan tarif baru.

Perang dagang ini juga berdampak terhadap sektor keuangan Indonesia. Ketidakpastian global menyebabkan volatilitas di pasar modal, menurunkan kepercayaan investor, dan berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada kerja sama ekonomi multilateral akan menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional apabila ketegangan ini terus berlanjut.

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan dinamika geopolitik yang memengaruhi tatanan ekonomi global. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan memperkuat diplomasi ekonomi, sekaligus mendorong diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada negara-negara adidaya.

Strategi Indonesia dalam Menangani Dampak Retaliasi Tiongkok terhadap Perang Dagang Amerika Serikat

Retaliasi Tiongkok dalam bentuk peningkatan tarif dan pembatasan impor terhadap produk asal Amerika Serikat menyebabkan terjadinya perubahan arus perdagangan global. Fenomena ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Di satu sisi, terdapat potensi peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok sebagai substitusi produk-produk asal Amerika Serikat. Di sisi lain, penurunan permintaan domestik di Tiongkok akibat perang dagang menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku dari negara lain, termasuk Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia menerapkan beberapa strategi yang bersifat adaptif dan preventif untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, antara lain:

1. Diversifikasi Pasar Ekspor

Pemerintah Indonesia mendorong pelaku industri dan eksportir untuk melakukan diversifikasi pasar, dengan memperluas jangkauan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan Tiongkok.

2. Penguatan Diplomasi Ekonomi Bilateral dan Regional

Indonesia secara aktif meningkatkan kerja sama bilateral dan regional dalam kerangka ASEAN, RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan perjanjian perdagangan bebas lainnya untuk membuka akses pasar baru dan memperkuat jaringan perdagangan internasional.

3. Insentif dan Fasilitasi Ekspor

Melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal, seperti insentif pajak, percepatan pelayanan ekspor, serta bantuan teknis kepada UMKM, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Hal ini penting untuk menangkap peluang dari pasar-pasar yang terdampak oleh perang dagang.

4. Pengembangan Industri Substitusi Impor

Untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan, Indonesia juga mendorong pengembangan industri dalam negeri yang mampu memproduksi barang substitusi impor, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang terdampak konflik dagang.

5. Stabilisasi Makroekonomi dan Perlindungan Investasi

Dalam rangka menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global, Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta menjamin iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi dan peningkatan kemudahan berusaha.

6. Pemanfaatan Momen Relokasi Industri

Perusahaan-perusahaan multinasional yang terkena dampak perang dagang mulai mempertimbangkan relokasi fasilitas produksi dari Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara. Indonesia berusaha memanfaatkan peluang ini dengan memperbaiki infrastruktur, regulasi investasi, dan kualitas tenaga kerja guna menarik investor asing yang mencari basis produksi baru.

KESIMPULAN

Perang dagang Amerika Serikat dan China yang dimulai sejak 2018 berakar pada isu defisit perdagangan, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Meskipun sempat mereda, ketegangan kembali memuncak pada 2025 dengan saling balas tarif yang tajam. Alih-alih menyelesaikan konflik, perang dagang ini memperburuk ekonomi global, mengganggu rantai pasok, dan menciptakan ketidakpastian pasar, sementara ketergantungan ekonomi kedua negara justru memperumit penyelesaiannya.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia sebagai negara mitra dagang strategis. Untuk merespons tekanan eksternal tersebut, Indonesia menerapkan pendekatan adaptif melalui diversifikasi pasar ekspor, penguatan diplomasi ekonomi, pemberian insentif, pengembangan industri substitusi impor, stabilisasi makroekonomi, dan pemanfaatan peluang relokasi industri. Strategi ini mencerminkan upaya komprehensif dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional serta menegaskan pentingnya kerja sama internasional dan keterlibatan aktif dalam pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas. (2025). Tarif Impor As-China Turun Drastis, Apa Saja Dampaknya Bagi Indonesia? <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/14/050000765/tarif-impor-as-china-turun-drastis-apa-saja-dampaknya-bagi-indonesia->
- Mai, N. C. (2022). Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Cina Terhadap Pertumbuhan Investasi Asing Di Vietnam Tahun 2018-2019. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bkysp>
- Media, K. C. (2025, May 13). Dampak Meredanya Perang Dagang As-China Ke Indonesia: Peluang Dan Ancaman. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2025/05/13/102739226/dampak-meredanya-perang-dagang-as-china-ke-indonesia-peluang-dan-ancaman>
- Rompis, A. P., Harda, H. P., Putra, L. P., & Kurniawati, R. (2024). Dampak Perang Dagang Amerika Serikat Dan Tiongkok Terhadap Ekspor Elektronik Indonesia. 1(3).
- Savira, G. N. (2023). Kesesuaian Prinsip Retaliasi Dalam Kasus Perang Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok. *Belli Ac Pacis*, 8(2), 97. <https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74498>
- Syahfitri, M. D., Aulia, J., Tambunan, B., Muliana, R. S., & Nasution, A. R. (2024). Analisis Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-China Terhadap Ekonomi Politik Indonesia. *Mantap: Journal Of Management Accounting, Tax And Production*, 2(1), 164–168. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1598>